

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

**EVALUASI FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU DALAM
PELAKSANAAN PILKADA KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2024**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Ilmu Administrasi Publik**

**Disusun Oleh :
CHRISTIAN ROTEN GIDION
NIM. 530020234**

**SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2025**

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan salah satu instrumen utama dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang menuntut penyelenggaraan secara langsung, bebas, jujur, dan adil serta demokratis. Oleh karena itu, untuk menjamin integritas proses tersebut, sangat diperlukan fungsi pengawasan yang efektif oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malinau Tahun 2024 serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan Pilkada 2024 di Kabupaten Malinau. Informan penelitian ini terdiri dari jajaran Bawaslu Kabupaten Malinau, pengawas pemilu di tingkat kecamatan dan Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan Pilkada. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum fungsi pengawasan Bawaslu Kabupaten Malinau dalam pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 telah berjalan cukup efektif, ditunjukkan dengan terlaksananya pengawasan pada seluruh tahapan Pilkada, adanya upaya pencegahan pelanggaran, serta penanganan pelanggaran administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tingginya tingkat partisipasi pemilih dan relatif kondusifnya pelaksanaan Pilkada juga menjadi indikator keberhasilan pengawasan. Namun demikian, efektivitas

pengawasan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, kondisi geografis wilayah perbatasan yang sulit dijangkau, rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam pengawasan partisipatif, serta keterbatasan kewenangan Bawaslu dalam penindakan pelanggaran tertentu. Faktor pendukung pengawasan meliputi koordinasi yang baik antara Bawaslu dengan pemangku kepentingan terkait, peran aktif pengawas di tingkat bawah, serta dukungan regulasi yang memadai. Sementara itu, faktor penghambat utama berasal dari aspek teknis, geografis, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya pengawas, penguatan pengawasan partisipatif masyarakat, serta optimalisasi strategi pengawasan berbasis kondisi lokal menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Pilkada di masa mendatang.

Kata kunci: Bawaslu, Demokrasi Lokal, Kabupaten Malinau, Pengawasan Pemilu, Pilkada

**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

**Tugas Akhir Program Magister yang berjudul
EVALUASI FUNGSI PENGAWASAN BAWASLU DALAM
PELAKSANAAN PILKADA KABUPATEN MALINAU TAHUN 2024**

adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Malinau , 12 April 2026

Yang Menyatakan
Materai Rp. 10.000



(Christian Roten Gidion)
NIM 530020234

PERSETUJUAN TAPM
PASCA UJIAN SIDANG

Judul TAPM : Evaluasi Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malinau 2024

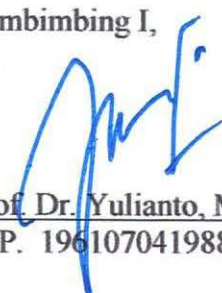
Penyusun TAPM : Christian Roten Gidion
NIM : 530020234
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Hari/Tanggal : Kamis, 12 Maret 2026

Menyetujui

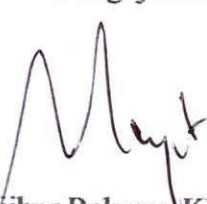
Pembimbing II,


Dr. Sofjan Arifin, M.Si
NIP. 196606191992031002

Pembimbing I,


Prof. Dr. Yulianto, M.Si
NIP. 196107041988031005

Penguji Ahli


Prof. Dr. Mujibur Rahman Khairul Muluk, M.Si

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik


Prof. Dr. Siti Aisyah, M.Si
NIP. 196806121999032001

Direktur Sekolah Pascasarjana


Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si
NIP. 196305091989031002

**UNIVERSITAS TERBUKA
SEKOLAH PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

PENGESAHAN HASIL UJIAN SIDANG

Nama : Christian Roten Gidion
NIM : 530020234
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik
Judul TAPM : Evaluasi Fungsi Pengawasan Bawaslu Dalam Pelaksanaan
Pilkada Kabupaten Malinau 2024

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM)
Program Studi Magister Administrasi Publik, Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka
pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Maret 2026
Waktu : 09:00 – 10:30 WIB

dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

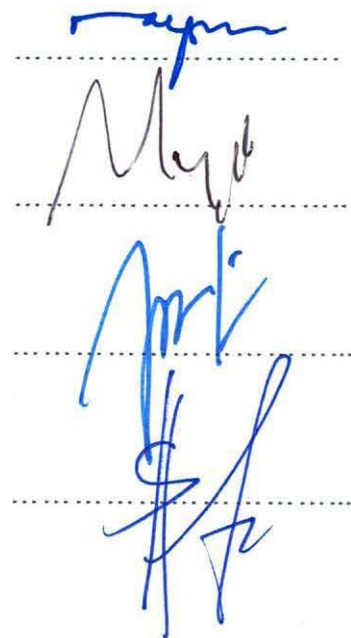
Tanda Tangan

Ketua Komisi Penguji
Nama : Prof.Dr.Siti Aisyah, M.Si

Penguji Ahli
Nama : Prof.Dr.Mujibur Rahman
Khairul Muluk, M.Si

Pembimbing I
Nama : Prof.Dr. Yulianto, M.Si.

Pembimbing II
Nama : Dr. Sofjan Arifin, M.Si



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan penyertaan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Evaluasi Fungsi Pengawasan Bawaslu dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Malinau Tahun 2024” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.AP) pada Universitas Terbuka Tarakan. Penyusunan tesis ini merupakan proses panjang yang tidak terlepas dari berbagai tantangan, hambatan, serta dinamika yang penulis hadapi. Namun, berkat doa, dukungan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.Si, selaku dosen pembimbing I, yang telah dengan penuh kesabaran, ketelitian, serta dedikasi tinggi dalam memberikan arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat berharga kepada penulis sejak awal hingga selesainya tesis ini.
2. Bapak Dr. Sofjan Arifin, M.Si, selaku dosen pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, koreksi, serta saran konstruktif yang sangat membantu penulis dalam menyempurnakan tesis ini.
3. Seluruh dosen dan civitas akademika Universitas Terbuka Tarakan, yang telah memberikan ilmu pengetahuan, wawasan, serta pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan pada program Magister Administrasi Publik.
4. Secara khusus dan penuh cinta, penulis mempersembahkan ucapan terima kasih yang mendalam kepada istri tercinta, Meiga Trivina, yang senantiasa menjadi sumber kekuatan, inspirasi, dan motivasi bagi penulis. Terima kasih atas doa, kesabaran, pengertian, serta dukungan tanpa henti yang diberikan dalam setiap proses yang penulis jalani.
5. Kepada anak tersayang, Yoon Buaq Queency, yang selalu menjadi penyemangat dan sumber kebahagiaan bagi penulis. Kehadiranmu menjadi

alasan utama bagi penulis untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik.

6. Kepada orang tua tercinta, Mathen Luther, Frosa Paberu, dan Martha Ubang, yang telah membesarkan, mendidik, serta memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang tiada pernah putus kepada penulis. Segala pengorbanan dan cinta kasih yang diberikan menjadi landasan utama dalam setiap langkah kehidupan penulis.
7. Dengan penuh rasa hormat dan doa, penulis mengenang almarhum bapak mertua, Endang Irin, yang semasa hidupnya telah memberikan dukungan, perhatian, serta doa kepada penulis. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa.
8. Kepada saudara-saudari terkasih, Emilka Frothen Margareth, Glorya Tri Oktavia, Eko Widiyanto, dan Hendra Ruru, yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, serta semangat kepada penulis.
9. Kepada kakak ipar, Iwan Batoq dan Dewi Vandriani, serta keponakan tersayang, Uyang, Daffin dan Maudy, yang telah memberikan keceriaan, dukungan, dan semangat selama proses penyelesaian studi ini.
10. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan bantuan, dukungan, dan kontribusi dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, serta menjadi referensi dalam meningkatkan kualitas fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

Malianu, 12 April 2026

Christian Roten Gidion

DAFTAR PUSTAKA

- Aermadepa, A. (2019). Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Oleh Bawaslu, Tantangan Dan Masa Depan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 1(2), 1. <https://doi.org/10.31604/justitia.v1i2.1-14>
- Akhsani, R. N. M., Manaqib, U., Fandik, A., & Ratib, V. A. B. (2024). Eksistensi kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024. *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial*, 4(2), 236–247.
- Amal, B., Taman Amir Hamzah No, J., & Pusat, J. (2019). KEWENANGAN MENGADILI OLEH BAWASLU ATAS SENGKETA PROSES PEMILU YANG DIATUR DALAM PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM. In *Jilid* (Vol. 48, Issue 3).
- Aminuddin Kasim, Supriyadi, & Andi Intan Purnamasari. (2021). Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi Yang Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Pilkada. *Mimbar Hukum*, 33(2), 494–520. <https://doi.org/10.22146/mh.v33i2.3730>
- Anggraini, D., & Perdana, A. (2024). Evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak Provinsi Jambi tahun 2020. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan (Mankeu)*, 13(5), 1602–1615.
- Awaluddin, M., Siallagan, D. Y., Era Prestoroika, & Ul Qadri. (2023). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENANGGAPAN PELANGGARAN PEMILU (STUDI KASUS NETRALITAS ASN DI KOTA PONTIANAK. *JURNAL PERSPEKTIF ADMINISTRASI DAN BISNIS*, 4(1). <https://doi.org/10.38062/jpab.v4i1.454>
- Choirulsyah, D., & Azhar, A. (2024). Implementasi Etika Administrasi Publik : Langkah Utama dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 9(3), 195–203. <https://doi.org/10.36982/jpg.v9i3.3757>

- Daud, R. F., & Haryadi, S. (2022). Membangun Citra Positif Masyarakat terhadap Penyelesaian Sengketa Pilkada dalam Upaya Memperkuat Legitimasi. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 3(2), 102–111. <https://doi.org/10.31849/joels.v3i2.9013>
- Dwi, H., Pelu, A., & Wijaya, N. (n.d.). Kewenangan Badan Pengawas. In *COLLEGIUM STUDIOSUM JOURNAL* (Vol. 7, Issue 1). <http://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj>
- Falangi, S., Liando, D. M., Kumayas, N., Jurusan, M., Pemerintahan, I., Unsrat, F., Jurusan, S. P., Pengajar, S., Ilmu, J., Fispol, P., Abstrak, U., & Kunci, K. (n.d.). 2023. Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2020 Di Kabupaten Halmahera Utara (Studi kasus: PSU di Kabupaten Halmahera Utara). *JURNAL GOVERNANCE*, 1(1).
- Fikri, M., & Wardana, D. (2025). Evaluasi pelaksanaan tugas Bawaslu Kabupaten Pelalawan pada Pemilihan Umum tahun 2024. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan (JMP)*, 2(2), 232–243.
- Firdaus, S. U. T., & Anam, S. (2020). PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU 2019. *REFORMASI*, 10(2), 164–177. <https://doi.org/10.33366/rfr.v10i2.1915>
- Fitria Waluyo, P., Rodiyah, I., & Kunci, K. (n.d.). *Efektivitas Bawaslu dalam Pelaksanaan Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020*.
- Furqon, E. (2020). Kedudukan Lembaga Negara Independen Berfungsi Quasi Peradilan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Nurani Hukum*, 3(1), 77. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i1.8523>
- Helda, A. (2020). Mengenal Kewenangan Dalam Ilmu Hukum. *Ensiklopedia of Journal*, 2(4), 105–113.
- Iznillah, M. L., Hasan, A., & Yesi Mutia. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Bengkalis. *Jurnal Akuntansi*, 7(1), 29–41.
- Ja'far, M. (2018). EKSISTENSI DAN INTEGRITAS BAWASLU DALAM PENANGANAN SENGKETA PEMILU. In *Juni* (Vol.

2, Issue 1).

- Jumaeli, E. (2021). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 1(1), 1–12.
- Leodita, A., Prastika, A., & Puspaningrum. (2024). Meningkatkan integritas pemilu: Mengevaluasi peran dan tantangan Badan Pengawas Pemilu di Boyolali, Indonesia. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(3), 261–274.
- Lestari, R. A., & Santoso, A. (2022). Pelayanan Publik Dalam Good Governance. *JURNAL ILMU SOSIAL Dan ILMU POLITIK*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.30742/juispol.v2i1.2134>
- Ma'arif, W. M., Sakir, S., & Abhipraya, F. A. (2022). Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020. *Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan*, 8(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v8i1.3088>
- Mangar, I., & Ridho, M. R. (2022). Lembaga Independen Negara dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial-Humaniora*, Muhammad, B. Z. (n.d.). 2023. *Efektivitas Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum* (Vol. 4). <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kl>
- Muthia, P., Farhati, Z., Apriliyani, A., Hernawan, D., Ramdani, F. T., (2024). *Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan*. 3(7), 7903–7917.
- Nasution, A. I., Azaria, D. P., Alfarissa, T., Rafi, F., Abidin, M., & Fauzan, M. (2023). *PENINGKATAN PERAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA DALAM MENGAWASI KAMPANYE HITAM DI MEDIA SOSIAL PADA PEMILU SERENTAK 2024*. 8(2), 173–190. <https://doi.org/10.22219/jch.v8i2.27700>
- Octavia, E., & Rube'i, M. A. (2024). Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pontianak dalam menjalankan pengawasan pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2024. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (JPKN)*, 8(2), 288–297.
- Pelanggaran, D., Oleh, P., Pengawas, B., Muthia, P., Farhati, Z., Apriliyani, A.,

- Hernawan, D., Ramdani, F. T., Author, K., & Muthia, : (2024). *Implementasi Penanganan Tindak Lanjut Temuan dan Laporan*. 3(7), 7903–7917.
- Perdana, M. T., Alfari, M., & Iftitah, A. (2020). Kewenangan Bawaslu dalam Pilkada 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019. *Jurnal Supremasi*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v10i1.940>
- Prasetyani, E., Hartono, Y., & Susanti, E. (2016). Trigonometri Berbasis Masalah Di Sma Negeri 18 Palembang. *Jurnal Gantang Pendidikan Matematika FKIP - UMRAH*, 1(1), 31–40. <https://media.neliti.com/media/publications/261260-kemampuan-berpikir-tingkat-tinggi-siswa-06cbddac.pdf>
- Ratnia, S., Arry, B., & Idin, R. (2018). *Jurnal Wacana Politik* - ISSN 2502 - 9185 : Wacana Politik, 3(1), 14–28.
- Riastri Haryani. (2023). Optimalisasi Kewenangan Bawaslu Sebagai Lembaga Pengawas Pemilu dan Lembaga yang Menjalankan Fungsi Peradilan Menurut Undang-Undang Pemilu. *Binamulia Hukum*, 12(1), 89–98. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.347>
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno Suparno. (2022). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Safarin Novarizal, Hotma P. Sibuea, & Rahmat Saputra. (2024). Kedudukan dan Kewenangan Bawaslu Kota Bekasi Dalam Penanganan Pelanggaran Administrasi Dihubungkan Dengan Penegakan Keadilan Pemilu. *Krtha Bhayangkara*, 18(1), 107–130. <https://doi.org/10.31599/krtha.v18i1.1630>
- Simbolon, G. M., & Prakoso, M. A. (2025). Pengawasan Pemilu 2024 oleh Bawaslu Jakarta Selatan: Tinjauan kepatuhan hukum. *JIPOSSTER*, 4(2), 198–206.
- Susanti, M.H., & Setiajidi. 2022 *Program Kelurahan Pengawasan: Model Pengawasan Partisipatif Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Kota Semarang Tahun 2020*. Book Chapter Konservasi Pendidikan Jilid 3: Universitas Negeri Semarang. DOI: <https://doi.org/10.1529/kp.v1i3.49>
- Susanto, S. N. H. (2019). Good Governance Dalam Konteks Hukum Administrasi.

- Administrative Law and Governance Journal*, 2(2), 205–217.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.205-217>
- Susila Wibawa, K. C. (2019). Pengawasan Partisipatif untuk Mewujudkan Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(4), 615–628.
<https://doi.org/10.14710/alj.v2i4.615-628>
- Sugiyono, E., & Rahajeng, R. (2022). Pengaruh budaya organisasi, gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai melalui motivasi pegawai sebagai variabel intervening pada dinas ketahanan pangan, kelautan dan pertanian Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(7), 2691-2708.
- Taek, P. A. G., & Mbiri, A. D. J. B. (2025). Evaluasi partisipasi pemilih dalam Pemilu serentak tahun 2024 di Kabupaten Belu. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 11(2), 475–489.
- Therasari, A., Wahyudin, C., Apriliani, A., Maruapey, M. H., & Hernawan, D. (2024). *Peran Bawaslu dalam Implementasi Kebijakan Pengawasan Terhadap Pelanggaran Pemilu*. 3, 10109–10116.
- Ulul Albab, J., Sopan Tirta Kusuma, L., & Subandi, A. (2019). *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penegakan Hukum Pemilu (Studi Penanganan Pelanggaran Pemilu Pada Sentra Gakkumdu Provinsi Nusa Tenggara Barat)*. 23(2), 110–116.
- Utrecht, E. (2010) *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjajaran.
- Waruwu, S., Waruwu, S., Zega, Y., & Halawa, O. (2025). Analisis efektivitas sistem pengawasan internal dalam meningkatkan kinerja Bawaslu Kabupaten Nias dalam Pilkada serentak tahun 2024. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, 5(2), 2758–2767.
- Widodo, A. (2022). Sistem Pemilihan Kepala Daerah Yang Ideal Menurut UUD 1945. *Awasia: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi*, 2(1), 20–33.
<https://doi.org/10.55108/awasia.v2i1.115>

Winarto, R., Huda, A. E., & Ningtyas, H. M. D. (2022). Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu. *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 12(2).
<https://doi.org/10.33366/rfr.v%vi%i.3742>